

Daftar Isi

Pengantar Penulis

iii

BAGIAN I

PANCASILA PEREKAT BANGSA DAN PENGUAT NEGARA

Bab I	: Pancasila Sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama	3
	• Tantangan terhadap Pancasila	3
	• Pancasila dengan Dasar yang Kokoh	5
	• Penyakit Saling Klaim	10
	• Debat di BPUPKI	13
	• Karya Bersama	19
	• Bukan Yamin, Bukan Soekarno, tapi Karya Bersama	22
	• Penuntun Kebijakan Hukum	25
Bab II	: Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa	34
	• Dilema Demokrasi dan Integrasi	34
	• Indonesia Sebagai <i>Nation State</i>	36
	• Kaidah Penuntun Berdasar Pancasila	37
	• UUD Sebagai Pengawal Integrasi dan Demokrasi	40

• Ketahanan Nasional	42
• Ancaman dari Luar	44
• Ancaman dari Dalam	45
• Amanah Menjaga Integrasi	48
Bab III : Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-undangan	50
• Pertanyaan Aktual	50
• Pancasila Sebagai Sumber dan Kaidah Penuntun Hukum	51
• Penuangan di dalam Peraturan Perundang-undangan	54
• "Judicial Review"	64
• Kemajuan yang Harus Diakui	67
Bab IV : Ide dan Realitas Hukum, Moral, dan Politik	68
• Dasar Etik dan Moralitas Hukum	68
• Hukum dan Politik	69
• Perubahan Politik dan Perubahan Hukum	70
• Hukum Belum Efektif	74
• Peradilan yang Korup	80
• Kreativitas Korupsi	81
• Apakah Karena Budaya?	84
• Etika dan Moral dalam Penegakan Hukum	86
• Persoalan Etika	90
• Paradigma UUD 1945	94
• Etika dalam Pendidikan Hukum	99
• Ranah Pembangunan Hukum Kita	106
• Langkah-langkah	107

	BAGIAN 2	233
	PERDEBATAN REFORMASI KONSTITUSI	235
		235
Bab I	: Kontroversi Perubahan Konstitusi	113
	• Keniscayaan Kontroversi	113
	• Pengesahan dan Perubahan Pertama	116
	• Maklumat No. X Tahun 1945	118
	• Diganti Secara Resmi dengan KRIS 1949	120
	• Dari UUDS 1950 ke UUD 1945	122
	• Dekrit Presiden 5 Juli 1959	126
	• Reformasi 1998	133
Bab II	: UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan	138
	• Pertanyaan-pertanyaan	138
	• UUD 1945 dan Otoriterisme	139
	• UUD 1945 Setelah Perubahan	144
	• Keabsahan UUD 1945 Hasil Amandemen	147
	• Fakta Historis	149
	• Ketentuan Yuridis	149
	• Landasan Filosofis	151
	• Belum Sempurna	152
	• Masalah Pilihan Politik	154
Bab III	: Capaian Reformasi dan Proyeksi Hukum Kita	156
	• Latar Belakang Reformasi Hukum	156
	• Langkah-langkah Reformasi	159
	• Hasil yang Dicapai	162
	• Produktivitas MK	163
	• Berbelok ke Oligarki	167
Bab IV	: Ide Perubahan Kembali UUD 1945	168
	• Hasil Perubahan	168
	• UUD 1945 Asli Sangat Bagus	170
	• Sudah Diubah dengan Cermat	171
	• Problem dalam Undang-Undang	172

• Tuntutan Perubahan Lanjutan	174
• Prosedur Perubahan	176
• Suara Rakyat, Suara Tuhan	177
Bab V : Agenda Perubahan Lanjutan UUD 1945	178
• Tiga Arus Sikap atas UUD Sekarang	178
• Perbandingan Waktu dan Keseriusan	181
• Konstitusi Sebagai "Resultante"	188
• Soal Bikameralisme	189
• Perubahan Karena Kebutuhan	192
• Menyiasati Prosedur Perubahan	194
BAGIAN 3	
INTEGRASI BANGSA DAN KEDAULATAN NEGARA	
Bab I : Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	201
• Kilas Balik	201
• Mosi Integral Natsir	205
• Negara Kesatuan Sebagai Pilihan Politik	210
• Tantangan Kini	213
Bab II : Tata Kelola Perbatasan Negara Kita	216
• Deklarasi Djuanda	216
• Ancaman Intervensi dan Disintegrasi	219
• Pengelolaan Perbatasan	223
• Persoalan Perangkat Hukum	224
• Persoalan Institusi yang Menangani	227
• Persoalan Perundingan	228
• Persoalan Kemampuan Mengamankan	229
• Pembentukan UU	231
Bab III : Politik dan Hukum Kewarganegaraan Indonesia	232
• Pembalikan Filosofi	232
• Penghilangan Diskriminasi	233

• Perubahan Konsep "Indonesia Asli"	•	233
• Kekebabatan yang Parental	•	235
• Siapa Pun Boleh Menjadi Warga Negara	•	235
• Kewarganegaraan Otomatis	•	236
• Kewarganegaraan Karena Pewarganegaraan		240
• Kehilangan dan Perolehan Kembali		243
• Kewarganegaraan	•	243
• Ancaman Pidana	•	245
• Kewajiban Warga Negara		246
BAGIAN 4		
POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN		
Bab I : Mahkamah Konstitusi dan Politik	•	255
Perundang-undangan	•	255
• Peraturan Perundang-undangan dan	•	255
Sistem Hukum	•	257
• Alasan <i>Judicial Review</i>	•	259
• Persoalan Perundang-undangan di Indonesia		260
• Perubahan UUD 1945		262
• Fungsi Mahkamah Konstitusi		265
Bab II : Rambu dan Batas Kewenangan Mahkamah		265
Konstitusi		265
• Tiga Latar Belakang		267
• Langkah-langkah Reformasi		269
• Masalah Komisi Yudisial (KY)		273
• Posisi Konstitusional Mahkamah Konstitusi		273
• Prestasi Mahkamah Konstitusi		275
• Produktivitas Mahkamah Konstitusi		276
• Perdebatan Antar Hakim Konstitusi		277
• Persoalan-persoalan dalam Putusan MK		281
• Sepuluh Rambu		

• Pengujian	284
• Harapan yang Salah	285
• “Constitutional Complaint”	287
• “Constitutional Question”	289
• Pembatasan dan Penambahan Wewenang	290
BAB III: Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas	292
• Prolegnas Sebagai Penjamin Konsistensi	292
• Koordinasi di (dan antara) DPR dan	
• Pemerintah	302
• Problem Koordinasi Prolegnas	305
• Prolegnas Dipuji Tapi Kurang Bertaji	308
Bab IV : Urgensi Naskah Akademik dalam	
Penyusunan RUU	311
• Penertiban Peraturan Perundang-undangan	311
• Urgensi Naskah Akademik	313
• Indikator ROCCIPI	314
• Peraturan Tak Mewajibkan Ada NA	318
• Berbagai Persoalan	322
• Langkah-langkah	324
BAGIAN 5	
PERCIKAN GAGASAN DI MEDIA MASSA	
➤ Sudah Habis Teori di Gudang	329
➤ Operasi Caesar Penegakan Hukum	333
➤ Hukum dalam Politik Oligarkis	337
➤ Jangan Putar Balik Jarum Amandemen UUD	340
➤ Konstitusi Buatan Rakyat	344
➤ UUD Tak Harus Masuk Lembaran Negara	348
➤ Presidensial Bergaya Parlementer	353
➤ Bergesernya Fungsi Hukum	357
➤ Tidak Ada Sistem Ketatanegaraan Asli	361

➤ Konstitusi Vox Populi	365
➤ Politik-Hukum Kancil Pilek	369
➤ Paradoks Pelesetan Hukum	373
➤ Dominasi Politik Kaum Demagog	377
➤ Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel	381
➤ Penegakan Hukum ala Film Detektif	385
➤ Memosisikan Vonis Pilkada MA	390
➤ Pemberhentian Pejabat Korup	395
➤ Penegakan Keadilan di Pengadilan	399
➤ Persoalan Konstitusi Makin Menjamur	402
➤ Positif dan Negatif Suara Terbanyak	406
➤ Demokrasi Pilihan Terpaksa	410
➤ Demokrasi dan Nomokrasi Kita	413
➤ Pahlawan Suara Terbanyak	417
➤ Pemberitaan Hukum yang Mengacaukan	420
➤ Rekam Jejak Capres-Cawapres	424
Daftar Pustaka	429